

IMPLEMENTASI PENYALURAN BANTUAN SOSIAL SEBAGAI UPAYA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KABUPATEN BOMBANA (Studi Di Dinas Sosial Kabupaten Bombana)

Rahmi¹⁾, Syaifudin Suhri Kasim²⁾, Amin Tunda³⁾

^{1,2,3} Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Halu Oleo, Kendari, Indonesia
Email: rahmiammi295@gmail.com, syaifuddinskasim@uho.ac.id, amin.tunda@uho.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kendala yang dihadapi petugas dalam melakukan pendataan penerima bantuan sosial di Kabupaten Bombana, serta prosedur dan hasil pendataan tersebut terkait dengan upaya penanggulangan kemiskinan. Peneliti dalam penelitian ini bertujuan untuk mengkaji, menalar, dan mendeskripsikan data yang diperoleh di lapangan dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Data yang diperoleh meliputi upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bombana melalui penyaluran bantuan sosial, serta kendala yang dihadapi petugas dalam proses tersebut. Selanjutnya, penelitian ini menggunakan metode dokumentasi, observasi, dan wawancara. Sebanyak 10 orang informan, yaitu Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bombana, dan Petugas Dinas Sosial yang membidangi DTIKS, SIKS, dan NG. Informan pendukung penelitian ini adalah penerima bantuan di Kabupaten Bombana. Sumber informasi primer dan sekunder dikumpulkan dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tahapan penyaluran bantuan langsung tunai, mulai dari pendaftaran hingga penetapan Surat Keputusan KPM. Proses ini menghadapi tantangan seperti data ganda, ketidakkonsistenan penerima, serta kendala lokasi dan infrastruktur. Meski begitu, implementasi bantuan sosial tetap berjalan untuk mengatasi kemiskinan dan kelaparan bagi penerima manfaat.

Kata Kunci: Implementasi, Penyaluran Bantuan, Penanggulangan Kemiskinan

ABSTRACT

This study aims to analyze the challenges faced by officers in collecting data on social assistance recipients in Bombana Regency, as well as the procedures and outcomes of this data collection in relation to poverty alleviation efforts. The researcher seeks to examine, interpret, and describe the data obtained in the field using a descriptive qualitative research approach. The collected data includes poverty alleviation efforts in Bombana Regency through the distribution of social assistance, as well as the challenges encountered by officers in the process. Furthermore, this study employs documentation, observation, and interviews as research methods. A total of 10 informants were involved, including the Head of the Social Rehabilitation Section, the Head of the Social Affairs Office of Bombana Regency, and Social Affairs Office officers responsible for DTIKS, SIKS, and NG. Supporting informants in this study consist of social assistance recipients in Bombana Regency. Primary and secondary data sources were collected for this research. The findings of this study indicate that the stages of direct cash assistance distribution, from registration to the issuance of the Beneficiary Family (KPM) Decree, face challenges such as duplicate data, inconsistencies in recipient information, as well as location and infrastructure constraints. Nevertheless, the implementation of social assistance continues to address poverty and hunger among beneficiaries.

Keywords: Implementation, Distribution of aid, Poverty Alleviation

PENDAHULUAN

Untuk mengurangi potensi bahaya sosial, pemerintah daerah sering menawarkan bantuan keuangan dan material yang tidak berkelanjutan dan selektif kepada individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat luas. Praktik ini dikenal sebagai bantuan sosial. Banyak pertemuan yang tertarik dengan jenis pengeluaran lokal ini. Karena membantu banyak orang, terutama yang miskin, bantuan sosial menjadi topik yang menarik. Bantuan pemerintah dan masalah sosial sama pentingnya bagi masyarakat.

Yang dibutuhkan masyarakat di era transparansi ini adalah mendapatkan pelayanan yang luas yang baik dan bermutu, yang mana hal tersebut sudah menjadi dambaan masyarakat. Akan tetapi kemauan tersebut terkadang tidak sesuai dengan keinginan masyarakat karena cara kerja penyelenggaraan pemerintahan yang terkadang kacau, lamban, tinggi dan memayahkan, tentang ini tidak diharapkan disamping itu masyarakat sedang melaksanakan perbaikan-perbaikan administrasi. Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mendistribusikan bantuan sosial yang disediakan oleh lingkungan sekitar atau masyarakat sekitar untuk menambah dan menyeimbangkan kemampuan bantuan sosial mereka sendiri dengan kemampuan pemerintah federal. Ketika memutuskan bagaimana mengalokasikan dana untuk bantuan sosial, orang-orang yang berakal sehat harus mempertimbangkan keuntungan, keadilan, legitimasi, transparansi, akuntabilitas, dan kepentingan masyarakat, di antara kriteria lainnya. Penting untuk memberikan penjelasan menyeluruh tentang tujuan dan penerima manfaat dana bantuan sosial ketika mengalokasikan dana ini.

Kita masih belum menemukan cara untuk mengakhiri kemiskinan di negara kita. Kebijakan pemerintah yang menyebabkan pembangunan yang tidak merata berkontribusi terhadap kemiskinan. Dalam upaya untuk mengurangi kemiskinan, pemerintah telah menerapkan banyak program yang dapat memperlambat kelas menengah yang sudah berjuang. Ada tiga kelompok yang telah dibentuk sebagai bagian dari upaya untuk mengurangi kemiskinan di Indonesia. Kelompok pertama adalah Program Keluarga Harapan (PKH), yang mencakup program-program seperti bantuan operasional sekolah (BOS), bantuan siswa miskin (BSM), jaminan

kesehatan masyarakat (JAMKESMAS), dan program beras untuk keluarga miskin (RASKIN). Informasi ini bersumber dari Direktorat Jenderal Komunikasi dan Informasi Publik (2011), yang merupakan bagian dari Kementerian Komunikasi dan Informasi di Indonesia. Program-program yang meningkatkan dan meningkatkan kemungkinan pekerjaan atau kegiatan padat karya yang produktif merupakan Kategori 2 (kedua), yang merupakan serangkaian strategi penanggulangan kemiskinan yang difokuskan pada pemberdayaan masyarakat. Ini termasuk Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) dan lainnya. Program seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Program Usaha Bersama (KUBE) merupakan bagian dari Kategori 3 (ketiga), yang merupakan inisiatif untuk mengurangi kemiskinan melalui penguatan usaha mikro dan kecil.

Ada 327.29.000 orang yang hidup dalam kemiskinan di Sulawesi Tenggara pada bulan September 2016, yang merupakan 12,77% dari populasi. Tahun berikutnya, melonjak menjadi 331,71 ribu, atau 12,81%. Meskipun demikian, baik jumlah absolut maupun proporsi penduduk yang hidup dalam kemiskinan menurun antara tahun 2017 dan 2019. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa; meskipun ada beberapa perbaikan dalam kapasitas penduduk untuk memenuhi permintaan makanan dan non-makanan, banyak yang masih terperosok dalam kemiskinan. Tingkat kemiskinan makanan di Sulawesi Tenggara turun menjadi 11,04% pada tahun 2019, yang lebih rendah dari rata-rata nasional sebesar 9,22% tetapi masih lebih tinggi dari populasi miskin di seluruh negeri. Sebagian besar penduduk miskin Sulawesi Tenggara tinggal di daerah pedesaan. Jumlah penduduk miskin di pedesaan menurun selama kurun waktu 2016-2019. Terjadi penurunan sebanyak 46,73 ribu jiwa dalam kurun waktu tiga tahun, karena jumlah penduduk miskin pedesaan menurun dari 274,11 ribu jiwa pada tahun 2016 menjadi 227,38 ribu jiwa pada September 2019. Hal ini menunjukkan adanya pertumbuhan penduduk pedesaan sebesar 15,31%. Sementara itu, penduduk miskin perkotaan pada periode September 2016-September 2019 bertambah sebanyak 19.400 jiwa. Hingga September 2019, penduduk miskin pedesaan yang berjumlah 13,77 persen dan penduduk miskin perkotaan yang berjumlah 6,81 persen. Berdasarkan data statistik di atas, sebagian besar penduduk Sulawesi Tenggara bermukim di pedesaan. Hal

ini terutama disebabkan oleh sebagian besar penduduk perdesaan bekerja sebagai buruh tani atau bekerja langsung di sektor pertanian yang memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Bantuan sosial baik dalam bentuk uang maupun non-uang menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah Kabupaten Bombana. Kendala terbesar dalam penyaluran bantuan di daerah ini adalah data yang tidak akurat dan tidak mutakhir, sehingga sering terjadi kesalahan seperti salah penerima dan salah sasaran. Oleh karena itu, diperlukan data agar para pengumpul informasi daerah dapat memahami kebutuhan konsumen bantuan sosial baik dalam bentuk uang maupun non-uang.

Permasalahan yang ada di Pemerintah Bombana antara lain: Data masyarakat penerima bantuan sosial yang terekam dalam program lain seperti BLT Kota atau bantuan lainnya seperti Program Amanah Keluarga atau Bantuan Pangan Non Tunai; misalnya data masyarakat penerima bantuan sosial tunai yang terekam dalam program BLT Kota. Masalah informasi sering menjadi masalah di tingkat lokal adalah minimumnya pemahaman di tingkat lokal terhadap pergantian level keuangan yang tampak jelas bagi diri mereka dan keluarga mereka.

Hal ini menghambat penyediaan bantuan sosial. Tidak banyak orang yang mengetahui berbagai bentuk dan jenjang bantuan sosial pemerintah, yang merupakan masalah besar tersendiri. Di tingkat lingkungan, masyarakat menyatakan ketidaksetujuan ketika mereka atau tetangga mereka mendapatkan berbagai macam bantuan untuk masalah yang sama. Sehubungan dengan hal tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul kerja “Implementasi Penyaluran Bantuan Sosial dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Bombana” untuk mengetahui seberapa besar proporsi penduduk yang perlu ditingkatkan upaya penanggulangan kemiskinannya.

METODE PENELITIAN

Lokasi penelitian ini adalah Kecamatan Lameroro, Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara, dan Kantor Dinas Sosial Kabupaten Bombana. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Secara purposif mengambil sampel 10 orang baik penerima manfaat yang kiranya mampu memberikan keterangan dengan baik dan petugas pemberi manfaat yaitu yang menjadi informan dalam

penelitian ini bersama dengan Kepala Dinas Kab.Bombana, Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial dan Staf Dinas Sosial/DTKS SIKS/NG. Sugiyono, (2018) dikatakan bahwa purposive sampling adalah suatu jenis pengambilan sampel secara acak yang mana sekumpulan karakteristik tertentu ditujukan untuk kelompok sampel. Data primer dan sekunder merupakan dua kategori bahan yang diperlukan pada penelitian ini. interview, dokumentasi, dan observasi merupakan metode yang diperlukan dalam pengumpulan bahan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses Pendataan Dan Penyaluran Bantuan

Bantuan sosial didefinisikan sebagai dukungan keuangan jangka pendek yang diberikan kepada individu atau keluarga berpenghasilan rendah dengan tujuan agar mereka dapat meningkatkan kondisi kehidupan mereka melalui pengembangan kehidupan yang tepat (Kementerian Sosial, 2011). Bagian dari rencana tabungan pensiun yang dikelola pemerintah adalah program bantuan sosial, yang mengakui tanggung jawab pemerintah federal dan negara bagian terhadap kesejahteraan penduduk berpenghasilan rendah dan terabaikan. Berikut ini adalah tahapan pendataan bantuan dan penyaluran data: tata kelola pendataan KPM, pengiriman informasi ke Dinas Sosial, pengecekan dan pemutakhiran data, pemasukan data ke DIKS, verifikasi data, dan terakhir penetapan Keputusan KPM.

1. Proses Pendataan KPM

Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial, Ibu Sri Susiawati, S.Ip, yang berusia 37 tahun, bertugas mengumpulkan informasi bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan menggunakan data yang diberikan oleh desa. Informasi ini merangkum biodata penduduk desa menurut usia, kesejahteraan, kesehatan, pendidikan, dan disabilitas. DPM (Daftar Penerima Manfaat) mencakup Penerima Manfaat, dan jika ada Kartu Indonesia Sejahtera, maka dapat disertakan juga. Sama seperti yang di katakan oleh Anna Zahrotul W. dkk (Tahun 2022) tentang proses pendataan dan penyaluran bantuan sosial bahwa Proses Pendataan KPM (Keluarga Penerima Manfaat) merupakan proses penyaluran bantuan yang meliputi DPM (Daftar Penerima Manfaat), KIS (Kartu Indonesia Sejahtera), dan data data identitas meliputi KK, KTP, serta data tambahan, seperti profil demografi desa setempat

yang dipecah berdasarkan usia, kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, dan kecacatan.

2. Pengiriman Data Ke Dinas Sosial Kabupaten Bombana

Data yang dikirim ke Dinas Sosial berasal dari proses pendataan KPM (Keluarga Penerima Manfaat). Secara rinci, data diberikan ke Dinas Sosial dan tembusan ke Dinas Sosial Provinsi. Data ini kemudian dikirim ke Dinas Sosial. Dalam kapasitasnya sebagai Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bombana, Bapak Mappatang S.Ip (54 tahun) menjelaskan tata cara sebagai berikut: pertama, pendataan untuk asesmen penyaluran bantuan; kedua, pengiriman data ke Dinas Sosial Provinsi; dan terakhir, penyerahan ke Dinas Sosial Kabupaten Bombana.

3. Verifikasi dan Pemutakhiran Data

Verifikasi dan pemutakhiran data merupakan yang selanjutnya disebut Pemeriksaan, merupakan cara yang paling umum dalam memeriksa informasi guna menjamin bahwa pengumpulan informasi telah selesai sesuai dengan metodologi yang ditetapkan dan untuk menjamin bahwa informasi yang telah dikumpulkan atau diperbarui sesuai dengan kenyataan terkini di lapangan.

Sama halnya yang di katakan oleh Anna Zahrotul W. dkk (Tahun 2022) tentang salah satu bagian proses pendataan dan penyaluran bantuan sosial yaitu verifikasi dan pemuktakhiran bahwa Jadi verifikasi dan pemutakhirkan data dalam keberlangsungan pendataan dan pemberian bantuan yaitu bentuk memutakhirkan data yang telah dikirim ke Dinas Sosial untuk di lakukan verifikasi data agar sesuai dengan fakta-fakta yang ada.

4. Penginputan Data Kedalam DTKS

Penginputan data merupakan cara yang paling umum untuk memindahkan informasi dari bentuk fisik ke bentuk komputer, di mana informasi tersebut akan disusun dan ditempatkan ke dalam PC. Kemajuan mekanis saat ini sangat membantu orang-orang di bidang pekerjaan. Proses memasukkan data secara fisik ke dalam formulir permohonan dengan tujuan verifikasi dikenal dengan istilah entri data ke dalam DTKS (Data Kesejahteraan Sosial).

5. Pengecekan Data

Informan peneliti ini yaitu Ibu Jumiati, S.Ip (42 Tahun) menjelaskan bahwa setelah semua proses dilakukan maka akan ada lagi pengecekan ulang ia juga menjelaskan bahwa setelah proses pendataan, pengiriman data, verifikasi awal, dan penginputan maka langkah selanjutnya adalah pengecekan data ulang atau verifikasi akhir agar dapat dilakukan langkah selanjutnya.

6. Penetapan SK KPM

Informan peneliti ini selaku Kepala Dinas Sosial Kab. Bombana menjelaskan bahwa setelah pengecekan ulang data calon penerima manfaat maka terbitlah Surat Keputusan KPM (Keluarga Penerima Manfaat). Anna Zahrotul W. dkk (Tahun 2022) juga menyimpulkan hal yang sama tentang proses pendataan dan penyaluran bantuan sosial bahwa dengan itu dapat disimpulkan bahwa terbitnya SK KPM adalah bentuk realisasi bantuan sosial yang akan di tersalurkan untuk penerima penerima manfaat.

Kendala Dalam Proses Bantuan Sosial

Kendala yang muncul dalam penyaluran dana bantuan sosial ini berhubungan dengan akuntabilitas dan fleksibilitas. Akuntabilitas dalam penyaluran bantuan terhambat karena minimnya informasi yang memadai dari masyarakat. Duplikasi data, ketidaksesuaian penerima bantuan, lokasi penyaluran yang tidak nyaman, keterbatasan kuasa hukum, dan infrastruktur yang sudah ketinggalan zaman atau tidak ada merupakan beberapa permasalahan yang mungkin timbul dalam upaya penyaluran bantuan sosial.

1. Duplikasi Data

Duplikasi data merupakan sebuah bahan yang hampir sama dan sengaja disamakan dengan data aslinya. Kita menjumpai berbagai jenis materi setiap hari; salah satu materi tersebut adalah duplikasi data, yang menjadi masalah saat menyalurkan bantuan sosial karena penerimanya mungkin memiliki data ganda.

2. Penerimaan Bantuan Yang Tidak Sesuai

Peserta bantuan tidak sesuai dalam pemberian bantuan adalah ada nya kendala ketidaksesuaian yaitu Identitas tidak sesuai, atau data yang tidak di

temukan di DPM (Daftar Penerima Manfaat), kendala ini dapat saja terjadi baik teknis maupun non teknis. Penjelasan salah satu informan peneliti yaitu Bapak Mappatang, S.Pi (54 Tahun) Selaku Kepala Dinas Sosial Kab. Bombana menjelaskan bahwa kendala penerima bantuan yang tidak sesuai biasanya di pastikan terlebih dahulu ketidaksiannya, jika ketidaksiannya itu adalah bentuk identitas seperti NIK yang terdaftar dan yang mengambil bantuan tidak sesuai itu perlu di tindak lanjuti, akan tetapi jika kendalanya adalah ketidaksiannya penerima manfaat yang telah terdaftar dalam penerimaan bantuan BLT, PKH dan lain-lain maka otomatis penerima manfaat tersebut ditolak, dan di alihkan kepada yang belum menerima bantuan BLT, PKH, dll.

3. Lokasi Pendistribusian Yang Terlalu Jauh Dari Alamat

Lokasi penelitian melintasi banyak pulau sebelum mencapai masyarakat yang terletak di salah satu kecamatan di Kabupaten Bombana; akibatnya, kesulitan dalam mengangkut bantuan ke titik distribusi yang jauh harus dipelajari secara cermat. Dari penjelasan informan peneliti dapat di simpulkan bahwa hambatan atau kendala ini sering terjadi karena mengingat lokasi Kab. Bombana sebagian besar merupakan bagian pesisir dan pulau sehingga dengan itu kendala dalam penyaluran terhadap lokasi pendistribusian terlalu jauh dari alamat mengingat juga banyak masyarakat penerima manfaat yang tinggal di daerah gunung untuk berkebun terkadang tidak sesuai dengan alamat KTP yang tertera kemudian petugas kesulitan penyaluran bantuan non tunai sehingga kami membutuhkan RT/RW setempat untuk ikut serta mendata lebih teliti terhadap kendala ini.

4. Kendala Surat Kuasa

Masalah dengan kuasa hukum penuh adalah masalah dengan kuasa hukum yang tidak disahkan oleh kepala keluarga. Umumnya masalah ini muncul jika kuasa hukum yang lebih tinggi tidak disahkan oleh pasangan karena keadaan tertentu seperti berlayar, bekerja di luar daerah/negara, terpisah, ditahan, dirawat di rumah sakit karena Virus Corona, dll. Dengan asumsi pasangan tersebut membawa buku untuk menjelaskan bahwa individu yang dimaksud adalah istri kepala keluarga yang pergi untuk menangani penagihan atau pemenuhan permintaan dari Kota atau kantor terkait, kita dapat memecahkan masalah ini

5. Sarana Dan Prasarana

Karena keterbatasan sarana dan prasarana di sektor penyaluran, maka sarana dan prasarana menjadi garda terdepan dalam upaya keberlangsungan pelaksanaan. Salah satu hal yang menghambat efektivitas penyaluran bantuan sosial adalah sarana dan prasarana yang terkait. Faktor utama yang menjamin tersalurkannya bantuan kepada penerima adalah sarana dan prasarana. Sama halnya dengan yang di katakana oleh Fachrizal Aliffan R (Tahun 2022) bahwa kendala dalam proses penyaluran bantuan sosial salah satunya adalah Sarana dan prasarana bahwa Dinas Sosial Kab.Bombana juga memiliki kendala dalam penyaluran bantuan sosial yaitu sarana dan prasarana mengingat tempat penulis meneliti adalah daerah perdesaan dan memiliki lokasi dengan beberapa warga tinggal di pulau atau pesisir dan pegunungan sehingga penyalur bantuan memiliki hambatan kendaraan yang mampu melewati beberapa daerah di Kab. Bombana.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas, maka kesimpulan yang dapat ditarik dalam penelitian ini adalah bahwa Proses pendataan dan penyaluran bantuan sosial di Kabupaten Bombana melibatkan tahapan yang sistematis, mulai dari pendataan KPM, pengiriman data ke Dinas Sosial, verifikasi dan pemutakhiran data, hingga penetapan SK KPM. Namun, terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya, seperti duplikasi data, ketidaksesuaian penerima bantuan, lokasi distribusi yang jauh, masalah surat kuasa, serta keterbatasan sarana dan prasarana. Kendala-kendala ini dapat menghambat efektivitas penyaluran bantuan sosial, sehingga diperlukan strategi yang lebih baik dalam pengelolaan data, koordinasi dengan pihak terkait, serta peningkatan infrastruktur untuk memastikan bantuan tepat sasaran dan diterima oleh yang berhak.

DAFTAR PUSTAKA

- Avriliyanti. 2015. *Dampak Kebijakan Pemberian Bantuan Sosial (BANSOS) Terhadap Masyarakat Miskin Di Kelurahan Padduppa Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo*. Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Muhammadiyah Makassar
- Anna Zahrotul Wahidah, Dkk. (Tahun 2022) *Prosedur Penyaluran Bantuan Sosial Di Era Pandemi Covid-19 Pada Dinas Sosial Kabupaten Blitar*. Administrasi Server dan Jaringan Komputer. Akademi Komunitas Negeri Putra Sang Fajar Blitar.
- Fachriza; Aliffan Rizky (Tahun 2022), *Peran Dinas Sosial Dan Penyaluran Bantuan Sosial Sebagai Langkah Penanggulangan Kemiskinan Dimasa*. Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung : Alfabeta